

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik kepada masyarakat, perlu adanya Restrukturisasi Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka Restrukturisasi Organisasi perlu adanya pemisahan fungsi sebagai regulator dan fungsi sebagai operator di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi operator, diperlukan satuan kerja yang dapat mengimplementasikan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan lebih independen, mandiri, dan dapat menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota Tim Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan reviu terhadap kajian restrukturisasi organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Melakukan perumusan kelembagaan dan organisasi Badan Layanan Umum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Melakukan perhitungan potensi dan proyeksi penerimaan Badan Layanan Umum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut pembentukan Badan Layanan Umum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian/Lembaga terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PERSIAPAN
PEMBENTUKAN BADAN
LAYANAN UMUM PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 Februari 2020

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Pengarah | 1. Roni Dwi Susanto 2. Setya Budi Arijanta 3. Sarah Sadiqa 4. Salusra Widya 5. Robin Asad Suryo 6. Ikak Gayuh Patriastomo |
| 2. | Ketua | Emin Adhy Muhaemin |
| 3. | Anggota | 1. Gusmelinda Rahmi 2. Iwan Herniwan 3. Hermawan 4. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 5. Dodi Wahyugi 6. Donald Sutanto Panjaitan 7. Wildan Massani 8. Edi Kristiyanto 9. Eko Rinaldo Octavianus 10. Rinaldi Morintosh 11. Mohamad Irvan Faradian |

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| | | 12. Mahsa Elvina Rahmawyanet |
| | | 13. Nicke Kusuma Devi |
| | | 14. Sarah Arlina |
| | | 15. Ermawanto |
| | | 16. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi |
| | | 17. Hilman Fazri |
| | | 18. Ardian Hoppin Sitompul |
| | | 19. Mario Duwi Cahyo |
| | | 20. Setiawan Rahandi Sabri |
| | | 21. Rizky Dwi Raharjo |
| | | 22. Lulu Haryani |
| | | 23. Bambang Saputra |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO